

PENERAPAN KLASTER INDUSTRI PADA KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Mandala Harefa³⁾

Abstract

Free trade agreement has lessened the existence of Indonesian products as seen in the current reports of interstates trade particularly after China joining the ASEAN free trade agreement. In response with tough competition from other countries in industrialization and businesses, producing low-price commodities through efficiency becomes a key strategy. This research attempted to see whether the formation of industrial clusters in special economic zones such as in the Riau Archipelago Province can create efficiency and increase competitive advantage of the Indonesian products. The research examined problems confronted by the province in producing competitive products through the creation of industrial clusters in Batam, Bintan, and Karimun regions. For this reason, the writer argues that successful industrial clusters need specific requirements in institutions, regulations, and infrastructures.

Keywords: industrial cluster, special economic zones, the Riau Archipelago Province

Abstrak

Kesepakatan perdagangan bebas, berdampak terhadap semakin turunnya eksistensi produk barang Indonesia. Kondisi ini nampak dari kinerja industri dalam perdagangan antar negara ASEAN, terlebih setelah China turut bergabung. Strategi dalam menghadapi persaingan produk dari industri negara pesaing adalah bagaimana menciptakan produk yang efisien. Penelitian ini difokuskan bagaimana upaya membentuk suatu kawasan industri dalam bentuk klaster seperti yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam

³⁾ Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Ekonomi Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Email : mandnias@yahoo.com

kawasan Batam, Bintan dan Karimun ada berbagai kegiatan industri yang dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing. Namun dalam implementasinya masih menghadapi masalah dalam menciptakan sebuah kawasan yang dapat menghasilkan produk yang efisien. Untuk membentuk dan berjajalan, kawasan dalam bentuk kluster membutuhkan persyaratan lembaga, regulasi dan infrastruktur yang terbaik.

Kata kunci : kluster industri, kawasan ekonomi khusus, Propinsi Kepulauan Riau

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Program Legislasi Nasional ada dua rancangan undang undang yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan perekonomian yaitu sektor yang berkaitan dengan Industri dan Perdagangan. Undang undang tersebut adalah Perubahan atas UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan RUU tentang Perdagangan yang baru diajukan oleh pemerintah. Pembangunan sektor industri pada saat ini dan masa depan dihadapkan pada tantangan global. Untuk menuju industri maju dan masyarakat niaga tangguh yang mampu bersaing, dibutuhkan industri dan perdagangan yang efisien dan efektif dalam menghadapi era globalisasi agar dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Tantangan pasar bebas semakin nyata setelah pada tanggal 1 Januari 2010 Asean- China *Free Trade Area* telah berlaku mengancam eksistensi industri dalam negeri. Para pelaku industri mengakui, bahwa produk China telah membanjiri pasar di berbagai daerah. Harganya yang murah menjadi alasan produk China kian digemari¹. Pelaku usaha menilai bahwa kondisi ini timbul akibat adanya AC-FTA yang melibatkan enam negara di kawasan ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2015, negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan Pemerintah optimistis kinerja semua cabang sektor industri manufaktur positif

¹ Harian Kompas, "Produk Cina memang murah", Minggu 3 Januari 2010.

pada 2010-2014. Target tahun 2010 pertumbuhan industri akan *rebound* menjadi 4,65 persen dan terus meningkat menjadi 8,95 persen pada 2014. Dari data yang ada di Depperin pertumbuhan industri yang akan dicapai pada 2009 sebesar 1,84 persen. Sektor-sektor yang hampir selalu tumbuh minus seperti sektor industri barang kayu dan hasil hutan ditargetkan tumbuh positif selama 5 tahun ke depan. Kondisi ini terjadi seiring dengan berkurangnya dampak krisis global. Rinciannya pemerintah menargetkan sektor industri mengalami pertumbuhan 4,65 persen pada 2010, 6,1 persen pada 2011, 6,75 persen pada 2012. Serta 7,47 persen pada 2013, dan 8,95 persen di 2014².

Dalam sektor perdagangan diperkirakan pertumbuhan nilai ekspor sepanjang tahun ini mencapai 10%. Target pertumbuhan ekspor ini lebih optimistis dibandingkan dengan target sebelumnya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebesar 7%-8,5%. Optimisme perkiraan tersebut dapat tercapai, karena kecenderungan pertumbuhan ekspor pada Januari 2010 yang mencapai level tertinggi 47,6%. Pertumbuhan ekspor pada Januari tersebut, tidak saja lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2009, tetapi juga Januari 2008. Diharapkan apa yang telah dicapai pada 2010 ini menunjukkan indikasi titik terang untuk tahapan selanjutnya. Bila melihat kecenderungan Januari 2010, akan dicapai pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga akan mencapai kembali level pertumbuhan ekspor pada level 2008.³

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik⁴ nilai ekspor mengalami penurunan ke semua negara tujuan, sedangkan Jepang tetap menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan kontribusi mencapai hampir 15 persen dari total ekspor Indonesia pada Januari tahun tersebut. Ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 14,25 persen atau US\$ 1,32 miliar. Dibandingkan Januari 2009, ekspor ke Jepang meningkat US\$ 65,3 juta. Diikuti Cina sebesar US\$ 1,01 miliar, dan Amerika Serikat US\$ 997,7 juta. Penurunan ekspor terjadi hampir ke semua negara tujuan utama.

Dalam menghadapi kondisi tersebut tentunya diperlukan berbagai upaya kebijakan yang terkait dengan undang-undang, regulasi dan berbagai peraturan dalam memacu sektor perindustrian dan perdagangan. Kedua proses ekonomi tersebut merupakan runtutan dan siklus yang tidak terpisahkan. Permasalahan yang muncul sering tidak ada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara lini pada tingkat pusat dan daerah. Permasalahan institusi, kebijakan, infrastruktur

² Hasil kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perindustrian, 24 Nov 2010

³ Bisnis Indonesia, "Ekspor diperkirakan tumbuh 10% ITPC", Jumat, 05 Maret 2010

⁴ <http://www.tempointeraktif.com/>, "Jepang Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor Indonesia", Senin, 01 Maret 2010, diakses 11 Mei 2010

dalam meningkatkan devisa dalam sektor industri dan perdagangan produk barang yang berkualitas agar dapat bersaing merupakan masalah klasik. Terutama menghadapi persaingan di era pasar bebas regional maupun global, kebijakan desentralisasi ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah haruslah mampu meningkatkan daya saing pelaku ekonomi daerah. Termasuk kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan, terutama daerah-daerah yang secara langsung dapat melakukan perdagangan pada kawasan regional maupun global.

Salah satu daerah yang memiliki potensi dan merupakan kawasan industri adalah Provinsi Kepulauan Riau. Namun Kondisi ini terlihat dari respon sektoral pada pertengahan tahun 2008 menunjukkan laju pertumbuhan yang melambat hampir di setiap sektor ekonomi. Bila melihat dari Data sementara BPS mencatat bahwa sektor Industri Pengolahan sebagai satu-satunya sektor yang mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Sebagai sebuah kawasan industri, tentunya sektor Industri pengolahan sangat berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kepulauan Riau. Di samping itu, keunggulan komparatif faktor lokasi yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia menjadikan sektor-sektor perdagangan dan jasa berperan penting dalam penguatan ekonomi daerah.

Secara sektoral, struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kawasan ekonomi khusus yang berbentuk klaster, masih didominasi oleh sektor Industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Namun demikian, kontribusi sektor Industri pengolahan dan pertambangan dalam pembentukan PDRB cenderung mengalami penurunan. Di lain pihak, peran sektor Perdagangan semakin penting terhadap pembentukan PDRB Kepulauan Riau, di samping sektor Pertambangan dan Bangunan. Perkembangan yang signifikan di sektor Perdagangan telah menumbuhkan sektor Jasa-jasa meski perannya masih dalam persentase yang relatif kecil.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Latar belakang di atas menggambarkan bahwa dampak globalisasi telah menjadi fenomena yang sulit dihindari. Implikasinya adalah bagaimana prospek industri ke depan, terutama di daerah-daerah yang langsung menghadapi persaingan dimana terdapat kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Penelitian ini akan mengungkap permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor industri setelah pembentukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau. Indikasi awal tentunya dilihat dari potensi dan kinerja serta

peluangnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan semakin terbukanya pasar di antara negara-negara Asia Tenggara. Selain itu yang perlu mendapat perhatian adalah dampak masuknya produk-produk industri buatan Cina terhadap produk nasional pada daerah tersebut.

Dalam hal ini tentunya industri pada kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk klaster mengupayakan agar produk yang dihasilkan mampu bersaing. Sebagai daerah yang memiliki berbagai keunggulan, namun masih menghadapi permasalahan. Pada awalnya pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjadi sebuah kawasan industri diyakini akan mampu menciptakan industri yang efisien dan dekat kepada pasar global sehingga akan meminimalisir biaya transaksi. Dengan demikian pembentukan kawasan klaster industri akan membuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industri.

Dalam era pasar bebas efisiensi suatu produk diperlukan dukungan infrastruktur dan birokrasi perizinan agar tidak tercipta ekonomi biaya tinggi. Untuk dapat bersaing kawasan industri dengan bentuk klaster tentunya diterapkan upaya untuk meminimalisir biaya agar tidak membebani proses produksi. Permasalahan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi seluruh proses industri, perdagangan dan ekspor produk. Karena dalam menghadapi persaingan produk, tentunya harus lebih efisien agar dapat bersaing.

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka permasalahan yang diteliti di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Bagaimana kinerja dan perkembangan kawasan ekonomi Batam, Bintan dan Karimun secara keseluruhan dan permasalahan yang masih dihadapi dalam memajukan sektor industri ?
2. Bagaimana perkembangan dan kondisi sektor Industri serta gambaran kinerjanya dalam perekonomian di Provinsi tersebut, hambatan-hambatan apa yang dialami dalam memajukan sektor industri sebagai sebuah kawasan berbentuk klaster ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan guna memperoleh informasi terakhir mengenai perkembangan industri dan perdagangan dalam kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk klaster. Selain itu mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor Industri dan perdagangan dalam kawasan tersebut. Hal ini tentunya terkait dalam implementasi undang-undang berkaitan dengan kebijakan industri yang akan dibahas di DPR. Dengan demikian

diharapkan akan dapat memberikan bahan masukan dalam perbaikan regulasi bagi kegiatan industri nasional dan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Sehingga dapat digunakan untuk perumusan kebijakan bagi anggota DPR dalam membahas permasalahan kebijakan atau regulasi sektor Industri.

D. Kerangka Pemikiran

Globalisasi dan liberalisasi sudah merupakan fenomena dunia yang tidak terelakkan. Setiap negara akan terkena arus liberalisasi perdagangan dunia tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini semua kegiatan industri tentunya harus tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing agar tetap efisien, terutama kegiatan industri yang terkonsentrasi dalam sebuah kawasan yang perlu lembaga pendukung baik publik maupun swasta. Fenomena tersebut ditandai oleh maraknya pembentukan blok-blok perdagangan bebas atau *free trade agreement (FTA)*, baik secara bilateral maupun regional. Beberapa negara yang memiliki perspektif sama terhadap arti penting liberalisasi perdagangan dan industri mulai membentuk kerja sama ekonomi dalam format FTA.

Konsekuensi dari kebijakan perekonomian terbuka yang diambil akan berdampak kepada keseluruhan faktor kegiatan perekonomian negara kita. Dampak kepada faktor Internal, yaitu : Faktor internal ekonomi di mana kondisi fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, realisasi RAPBN, kebijakan ekonomi pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta perkembangan ekspor nasional. Faktor internal non-ekonomi: kondisi politik dan sosial, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah) Faktor eksternal, yaitu: Prospek perekonomian dan perdagangan dunia, Kondisi politik global dan Pertumbuhan Ekonomi global.

Menurut Chacholiades⁵ partisipasi dalam perdagangan global atau internasional bersifat bebas (*free*) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan (*choice*) dengan pertimbangan secara ekonomi dan politik, oleh sebab itu sering dikatakan perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua pihak (*mutually benefited*).

Dalam sistem ekonomi tertutup negara hanya dapat mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi dengan melakukan

⁵ Lihat dalam Chacholiades, M. *International Trade Theory and Policy*. McGraw-Hill 1988, p. 544-545

perdagangan terbuka (*open economy*) suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi⁶. Hal ini didasari argumen bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdagangan⁷. Selanjutnya dijelaskan oleh Hadi⁸ bahwa selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan efisiensi ekonomi.

Demikian pula secara umum menurut Sri Mulyani Indrawati⁹, liberalisasi akan menguntungkan bagi negara berkembang dan penduduk miskin dari kelompok pendapatan menengah karena ekspor produk yang bersifat padat karya akan meningkat. Namun demikian, derajat manfaat dan keuntungan liberalisasi perdagangan sangat tergantung pada reformasi kebijaksanaan yang diambil dan keadaan struktur perekonomian domestik negara berkembang itu sendiri.

Namun demikian, karena terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar justru berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan¹⁰.

Dalam upaya menghadapi persaingan tersebut, maka industrialisasi telah menjadi kekuatan utama (*driving force*) di balik urbanisasi yang cepat di kawasan Asia sejak dasawarsa 1980-an. Berbeda dalam kasus industri berbasis sumber

⁶ Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones. *World Trade and Payments. An introduction*. Sixth Edition. Harper Collins. New York. . 1993, p; 19

⁷ Kindleberger, C.P. and P.H. Lindert. *International Economics*. Six Edition. Richard D. Irwin. Inc. Homewood. Illinois 60430. 1978. p.9

⁸ Hadi, PU, *Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor, hal.17

⁹ Sri Mulyani Indrawati, *Liberalisasi dan Pemerataan dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*. Soetrisno, L. dan F. Umayu (Editor). Yogyakarta: P. Tiara Wacana Yogya. 1995, hal. 94

¹⁰ Abidin, Z. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. Disertasi, tidak dipublikasikan. Program Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor. Tahun 2000. Dalam Gatoet S.Hardono. Handewi P.S Rachman dan Sri H.Suhartini, *Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empiris dan Prepektif Ketahanan Pangan* Jurnal Forum Argo Ekonomi Volume 22 No.2 Desember 2004, hal, 76.

daya (*resource-based industries*), industri manufaktur cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota. Pertanian dan industri berdampingan, bahkan kadang berebut lahan di seputar pusat-pusat kota yang pada gilirannya semakin mengaburkan perbedaan baku antara desa dan kota¹¹.

Hubungan positif antara aglomerasi geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan (Martin dan Octaviano, 2001)¹². Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-daerah yang mempunyai industri pengolahan lebih banyak mempunyai akumulasi modal. Dengan kata lain, daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak punya konsentrasi industri pengolahan.

Namun demikian ada perkembangan penting teori neo-klasik yakni pengenalan terhadap keuntungan-keuntungan aglomerasi. Marshall menyatakan bahwa jarak yang tereduksi dengan adanya konsentrasi spasial akan akan memperlancar arus informasi dan pengetahuan (*knowledge spillover*) pada lokasi tersebut. Pandangan Marshall tentang industri yang terkonsentrasi di suatu tempat dan saling terkait disebut *industrial cluster* atau *industrial district*. Ada beberapa manfaat eksternalitas melalui pendekatan geografis dan pengelompokan aktifitas produksi. Dalam menciptakan kluster industri dalam sebuah kawasan, dalam perspektif ekonomi menurut pendapat Marshall yang salah satu ide dasarnya mengungkapkan bahwa sentra industri mampu meningkatkan daya saing usaha pelakunya melalui beberapa mekanisme, yaitu: (1) berkumpunya tenaga kerja dengan spesifikasi khusus yang relevan dengan kebutuhan industri (2) tersedianya bahan baku dan fasilitas pendukung industri, serta (3) penyebaran inovasi.¹³

Senada dengan pendapat Marshall, Porter menyatakan bahwa kluster adalah perusahaan-perusahaan yang terkonsentrasi secara spasial dan saling terkait dalam industri. Kluster selalu memperluas aliran menuju jalur

¹¹ Lebih jauh lihat dalam McGee T.G., *The Emergence of Desa-kota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis*. Honolulu: University of Hawaii Press. 1991, Dalam Dr. Mudrajad Kuncoro, SE, M.Sc.Sc "Aglomerasi Perkotaan di DIY: Apa Di mana dan mengapa?.. Jurnal UNISIA, No. 59, Vol. 24, 2006, hal. 2

¹² Martin Pangabean and Octaviano., *Growth and Agglomeration*, International Economic Review 42, No. 4, 2001, PP 947-968

¹³ Alfred Marshall, A., *Principles of Economics*, Macmillan, London. 1920, p. 285

pemasaran dan konsumen, tidak ketinggalan juga jalur menuju produsen produk komplementer, dan perusahaan lain dalam industri yang terkait, baik terkait dalam keahlian, teknologi maupun input. Dalam kluster juga tercakup pemerintah dan institusi yang lain ¹⁴

Pengembangan kawasan ekonomi industri nasional melalui pendekatan kluster yang diadaptasi dari konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter akan berhasil diimplementasikan bila memenuhi persyaratannya terpenuhi. Tidak saja sumber daya yang ada saja, kesiapan regulasi, infrastruktur dan lembaga yang terkait sangat penting dalam pengembangan Industri suatu kawasan dengan industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dengan membentuk kluster industri, seperti BBK di wilayah Propinsi Kepulauan Riau

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2010 di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pemilihan lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah yang memiliki kawasan industri dan memiliki karakteristik daerah yang telah lama dipersiapkan sebagai lokasi kluster dan sekaligus merupakan kawasan perdagangan bebas. Dengan melihat kondisi tersebut penelitian akan melakukan penelitian ke sejumlah lembaga yang terkait dan pelaku industri di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan merupakan pemangku kepentingan dalam membantu kegiatan para pelaku industri dan perdagangan yakni Pemerintahan daerah, seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, BPS dan dan Kadinda Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan meliputi studi literatur dan penelitian lapangan dalam pengumpulan data sebagai bahan analisis dengan melakukan cara lebih dahulu melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan

¹⁴ Michael. E. Porter., *Clusters And The New Economics Of Competition*. Harvard Business Review. Vol. 76, 1998 Issue 6, pp7-20

mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, website serta dokumen yang berkaitan dan analisis dengan permasalahan tersebut.

3. Metode Analisis data

Dalam melakukan Penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang menganalisis secara deskriptif berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Diharapkan dari hasil pembahasan akan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan pengambil kebijakan dan para pelaku industri dan usaha perdagangan.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Propinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau) sejak tahun 2006 secara ekonomi dan pemerintahan telah mandiri, tidak ada campur tangan dari Propinsi Riau yang menjadi induk sebelum terbentuk. Selama tahun 2006, perekonomian tumbuh 6,78 persen, berarti meningkat dibanding tahun 2005 yang hanya 6,57 persen¹⁵.

Sementara, kondisi ekonomi tahun 2007 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonominya mencapai 12,09 persen, jauh melebihi pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang hanya 6,78 persen. Membaiknya indikator ekonomi regional dihasilkan dari pergerakan Indeks Harga Konsumen stabil, terbukanya kesempatan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, dan realisasi investasi asing dan domestik di wilayah Kepulauan Riau.

Selain itu, optimisme investor terhadap penetapan pulau Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) ditandai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) bulan Agustus 2007 antara 22 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan kepala daerah BBK. Dari 22 PMA itu, total investasi yang mengalir ke BBK mencapai 1,9 US\$ miliar atau lebih dari Rp 17,5 triliun, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 50.566 orang¹⁶.

¹⁵ BPS Kepulauan Riau "Provinsi Kepulauan Riau dalam angka", 2009

¹⁶ http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/Kep+Riau/KER+Provinsi+Kep+Riau+Triwulan+III-2007.html

Secara sektoral, pertumbuhan besar diperkirakan terjadi pada sektor pertanian khususnya sub-sektor perikanan dan perkebunan, sektor industri pengolahan, bangunan dan jasa. Sub-sektor komunikasi, hotel dan restoran ikut meningkat bersamaan dengan pergerakan positif sektor dominan itu. Sedangkan sisi permintaan, pertumbuhan diperkirakan didorong oleh realisasi investasi dan meningkatnya konsumsi swasta. Meski mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia hingga Juli 2008, optimisme momentum FTZ dan perkembangan positif kondisi ekonomi regional diharapkan mampu menahan laju inflasi sehingga inflasi tahun 2008 diperkirakan stabil.

Melihat PDRB yang ada, sektor ekonomi yang dominan adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Hasil pertanian yang menonjol adalah subsektor perikanan laut dan budidaya yang mencapai 216.574, 25 ton dengan nilai lebih dari Rp 97,31 milyar, terdiri dari hasil budidaya ikan laut Rp 91,79 milyar, ikan air tawar Rp 4.71 milyar, dan ikan air payau 733,35 juta. Daerah potensial untuk budidaya dan tangkapan ikan laut adalah pulau Karimun, Natuna dan Batam¹⁷.

Sementara ekspor Kepulauan Riau tahun 2006 mencapai US\$ 6.073.097.295 dengan jumlah komoditas sekitar 23.557.879 ton, meliputi Logam tidak mulia 35,55 persen, barang elektronik 33,56 persen, dan hasil industri lain mencapai sekitar 21,89 persen. Dilihat dari pelabuhan bongkar muat di Kepulauan Riau, Kota Batam dengan tujuh pelabuhan mampu mengekspor barang US\$ 5.243.041.658 dengan volume sebesar 1.458.172.966 ton atau 86,33 persen. Kemudian Kabupaten Bintan dengan dua pelabuhan mampu mengekspor barang senilai US\$ 570.786.312 dengan volume 6.138.093.357 ton atau 9,40 persen. Dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam ini, sektor Perdagangan dan Sektor Industri menjadi daerah andalan bagi Propinsi Kepulauan Riau¹⁸.

Hasil pertanian di Kepulauan Riau antara lain berupa tanaman padi 375,40 ton, jagung 714,04 ton, ubi kayu 5.984,7 ton, dan sayuran terutama sawi, kacang panjang, bayam, kangkung, dan ketimun yang rata-rata mencapai lebih Dari 4.000 ton. Hasil buah-buahan terutama nanas, durian, pisang dan rambutan yang rata-rata mencapai lebih dari 5.000 ton. Semua hasil tanaman pangan itu, merata di enam kabupaten-kota di Kepulauan Riau seperti Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Batam, dan kota Tanjung Pinang¹⁹.

Sementara hasil perkebunan yang menonjol adalah karet mencapai 24.047 ton, kelapa 5.763 ton terkonsentrasi di Natuna dan Lingga. Sedangkan

¹⁷ BPS 2009 Op.cit,

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

populasi ternak yang menonjol adalah Sapi 7.204 ekor, Kambing 20.238 ekor, Babi 6.595 ekor, Ayam Kampung 479.736 ekor, Ayam Petelur 431.911 ekor, dan Ayam Pedaging 6.284.676 ekor. Semua itu terkonsentrasi di Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Tanjungpinang, dan Kota Batam²⁰.

Aktivitas sektor industri pengolahan paling dominan adalah industri barang elektronik, barang logam, industri kimia, minyak, batu bara, bouksit dan industri tekstil (kain tenun). Bila ditotal jumlah industri di Propinsi Kepulauan Riau berjumlah 4.744 unit industri yang terpusat di Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Selain itu, meningkatnya aktivitas perdagangan dan pariwisata dengan berlakunya kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan dan Karimun. Hal ini berdampak terhadap pertumbuhan sektor jasa-jasa sebagian besar dihasilkan untuk penerimaan pemerintah daerah, terkait retribusi yang meningkat secara signifikan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat 18,10 persen, dihasilkan dari sub sektor perdagangan besar. Aktivitas itu memberi kontribusi yang signifikan terhadap sektor angkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 15,32 persen.

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada area perdagangan bebas memerlukan stabilitas politik dan keamanan. Hal ini akan memberi peluang besar terhadap bangkitnya investasi asing dan domestik di Kepulauan Riau, terutama kawasan industri dan galangan kapal. Pertumbuhan industri itu ikut menstimulus pertumbuhan perdagangan. Dengan melihat peta ekonomi di atas, untuk klaster daerah ini perdagangan industri dan perikanan laut harus dikembangkan lebih optimal ke depan. Dampak selanjutnya sektor jasa dari wisata bahari, hotel dan restoran akan memiliki prospek baik, jika dikelola secara profesional dengan meningkatkan prasarana pendukung kebutuhan wisata, di mana kegiatan ini menambah pendapatan daerah.

Perekonomian Kepulauan Riau di awal tahun 2010 semakin memperlihatkan tren ekspansif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di triwulan I-2010 sebesar 9,34% (*year-on-year*), yang merupakan level pertumbuhan tertinggi sejak terbentuknya provinsi ini di tahun 2002. Sebelumnya BPS juga merevisi angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2009, dari 0,56% menjadi 3,51% (*year-over-year*)²¹.

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

Dampak krisis keuangan global terhadap kinerja ekspor industri manufaktur berlangsung lebih *smooth* dari perkiraan semula. Realisasi ekspor di periode ini mencatat kenaikan secara tajam setelah sepanjang tahun 2009 lalu tumbuh negatif. Penguatan ekspor industri manufaktur yang semakin merata mendorong peningkatan impor bahan baku dalam rangka memenuhi *order* produksi dan *restocking inventory*.

Tabel 1: STRUKTUR PDRB MENURUT SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA TAHUN 2007-2008 DAN TRIWULAN II 2008-2009 (%)

SEKTOR EKONOMI/ LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	triwulan II	
				2008	2009
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	5,04	4,90	5,00	4,84	5,01
Pertambangan dan Penggalian	9,76	9,29	8,77	9,51	8,74
Industri Pengolahan	46,70	45,44	46,20	45,35	46,35
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55
Konstruksi	5,12	6,36	7,11	6,24	7,36
Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,52	20,58	19,54	20,75	19,04
Pengangkutan dan Komunikasi	4,27	4,59	4,66	4,53	4,64
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	5,51	5,53	5,40	5,53	5,50
Jasa-jasa	0,33	0,34	2,77	2,71	2,79
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PDRB TANPA MIGAS	91,50	91,92	92,44	91,71	92,48

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009

Pada triwulan III tahun 2010, sektor ekonomi yang memiliki peranan terbesar adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 46,52 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 19,64 persen serta sektor pertambangan dan penggalian 8,79 persen. Secara keseluruhan ketiga sektor tersebut mempunyai andil peranan sebesar 74,94 persen dalam PDRB. Perkembangan ekonomi eksternal dan domestik yang kian kondusif juga mendorong kegiatan investasi, terutama di sektor manufaktur seperti industri pembuatan/perbaikan kapal, industri mesin-mesin elektrik dan industri barang-barang logam. Kinerja sektor industri pengolahan Kepulauan Riau memanfaatkan momentum pemulihan industri manufaktur Singapura yang naik tajam ke level pertumbuhan 30% di periode ini setelah pada tahun 2009 lalu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,0%.

Kondisi ekonomi di sisi penawaran juga ditandai dengan semakin membaiknya pertumbuhan sektor-sektor utama lain, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor bangunan yang cukup mendorong aktivitas

pariwisata. Sementara daya beli masyarakat yang semakin terjaga memberi stimulus permintaan pada sektor perdagangan dan properti. Adapun tingginya kinerja pertumbuhan sektor infrastruktur listrik ditopang oleh lonjakan pemakaian listrik oleh sektor industri pengolahan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan III 2010 sangat ditopang oleh komponen Impor Barang dan Jasa. Dibandingkan terhadap triwulan sebelumnya (q to q) komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh 3,69%. Untuk komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 3,12%, komponen pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 2,19%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 1,96%, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,89 % dan komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh 0,07%. Dibandingkan perekonomian triwulan yang sama tahun sebelumnya (*y on y*), PDRB menurut penggunaan tumbuh 6,16%. Komponen pembentukan modal bruto tumbuh 18,00 %, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 14,98 %, komponen impor tumbuh sebesar 12,48%, komponen ekspor tumbuh 10,00%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 7,38% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh 5,88 %²².

Terkait dengan pemberlakuan kerjasama perdagangan bebas dengan Asean-Cina diperkirakan tidak berdampak besar baik terhadap kinerja perdagangan Kepulauan Riau dengan Cina. Khususnya bagi sektor industri pengolahan di kota Batam yang sejak dahulu sudah memanfaatkan sistem bebas bea masuk untuk produk-produk yang akan di re-ekspor dari kawasan khusus FTZ Batam. Impor dari Cina untuk di luar kawasan industri diperkirakan didominasi oleh produk-produk mainan dan sandang, namun nilainya tidak signifikan terhadap total impor Kepulauan Riau dari Cina yang pada tahun 2009 lalu mencapai US\$ 231,07 juta.

Produk impor utama dari Cina adalah besi dan baja di mana harganya relatif lebih murah dibandingkan jika dipasok dari Jakarta atau daerah lain di Indonesia. Ongkos angkut yang lebih besar menjadi komponen biaya utama yang mempengaruhi harga jual besi dan baja khususnya di wilayah Kepulauan Riau Selain itu impor mesin-mesin dan peralatan listrik juga cukup banyak beredar di pasar lokal. Sementara itu komoditas ekspor dominan selain dari Kapal Laut adalah mesin dan perlengkapan kantor, alat telekomunikasi, dan mesin/peralatan listrik. Melihat karakteristik daerahnya, bukan tidak mungkin pemberlakuan AGFTA bisa menjadi insentif bagi industri lokal di Kepulauan Riau

²² *Ibid*

khususnya kota Batam, karena masuknya bahan baku dan barang modal yang lebih murah dapat mempengaruhi ongkos produksi menjadi lebih kompetitif.

Tabel 2 : Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Triwulanan (%)

SEKTOR EKONOMI/ LAPANGAN USAHA	Triwul II 2008 terhadap Triwul I 2008	Triwul II 2009 terhadap Triwul I 2009	Triwul I 2009 terhadap p triw I 2008	Triwul I 2009 terhadap trw II 2009	Triwul III 2009 terhadap Triwul II 2010	Triwul III 2010 terhadap p triw III 2009
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,73	2,80	12,60	11,00	1,89	14,98
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,58	-0,68	27,88	9,96	0,07	5,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,54	3,17	8,83	9,58	1,96	7,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,14	0,04	7,60	5,58	2,19	18,00
Perubahan Stok						
Ekspor Barang dan Jasa	-2,50	0,95	-2,15	(1,02)	3,12	10,00
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,48	8,80	16,77	8,76	3,69	12,48
PDRB	0,97	0,89	-0,43	2,44	1,23	6,16

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009

Dari laporan BPS Provinsi kepri tahun 2009, terkait dengan pemberlakuan kerjasama perdagangan bebas dengan Asean-Cina diperkirakan tidak berdampak besar baik terhadap kinerja perdagangan Kepulauan Riau dengan Cina. Khususnya bagi sektor industri pengolahan di kota Batam yang sejak dahulu sudah memanfaatkan sistem bebas bea masuk untuk produk-produk yang akan di re-ekspor dari kawasan khusus FTZ Batam. Impor dari Cina untuk di luar kawasan industri diperkirakan didominasi oleh produk-produk mainan dan sandang, namun nilainya tidak signifikan terhadap total impor Kepulauan Riau dari Cina yang pada tahun 2009 lalu mencapai US\$ 231,07 juta.

Produk impor utama dari Cina adalah besi dan baja di mana harganya relatif lebih murah dibandingkan jika dipasok dari Jakarta atau daerah lain di Indonesia. Ongkos angkut yang lebih besar menjadi komponen biaya utama yang mempengaruhi harga jual besi dan baja khususnya di wilayah Kepulauan Riau Selain itu impor mesin-mesin dan peralatan listrik juga cukup banyak beredar di pasar lokal. Sementara itu komoditas ekspor dominan selain dari

Kapal Laut adalah mesin dan perlengkapan kantor, alat telekomunikasi, dan mesin/peralatan listrik. Melihat karakteristik daerahnya, bukan tidak mungkin pemberlakuan ACFTA bisa menjadi insentif bagi industri lokal di Kepulauan Riau khususnya kota Batam, karena masuknya bahan baku dan barang modal yang lebih murah dapat mempengaruhi ongkos produksi menjadi lebih kompetitif.

B. Pembahasan

Secara lebih rinci pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan sedang hingga triwulan tahun 2010 memiliki peran dominan, di mana kontribusi 9 sektor lapangan usaha Indonesia menunjukkan bahwa sektor Industri pengolahan tetap sebagai *the leading sector* yang memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian pula Di Provinsi Kepulauan Riau, sektor Industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi daerah dan Nasional.

Mengingat pentingnya sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau dan PDB Nasional, maka diperlukan indikator dini untuk mengamati perkembangan industri pengolahan. Salah satu indikator tersebut adalah Angka Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar Sedang (IBS) Bulanan. Angka tersebut dihasilkan dari pengolahan Survei IBS Bulanan yang datanya diperoleh dari beberapa perusahaan Industri Besar Sedang yang terpilih sebagai sampel. Angka yang dihasilkan dapat menggambarkan perkembangan produksi sektor Industri Pengolahan secara lebih dini karena sifatnya yang dirancang secara periodik Bulanan. Untuk saat ini penyajian datanya masih Triwulanan.

Pada tahun 2010²³, angka Pertumbuhan produksi sampai tingkat Provinsi termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu potensi Industri terbesar di Indonesia. Angka Pertumbuhan yang dirilis masih bersifat makro/global mengingat keterbatasan sampel yang ada.

Pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang Triwulan III tahun 2010 di Provinsi Kepulauan Riau secara total mengalami kenaikan sebesar 1,52 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan II tahun 2010. Sedangkan secara nasional pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang triwulan III tahun 2010 juga meningkat sebesar 2,02 %. industri karet dan arang dari karet dan barang dari plastik masih mengalami pertumbuhan produksi negatif (turun) sebesar - 5,36 % (q-to-q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -0.99%.

²³ Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2010

Untuk industri barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya mengalami penurunan produksi sebesar -1,91 % (q-to-q) dibandingkan triwulan II tahun 2010. Industri mesin dan perlengkapannya mengalami pertumbuhan negative sebesar -8,58 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan II tahun 2010

Tabel 3 : Pertumbuhan Produksi Industri Besar Sedang menurut KLBI 2 digit tahun 2010 q to q Provinsi Kepulauan Riau

NO	Kode	JENIS INDUSTRI	Pertumbuhan q-t-q (%)		
			TW II/10	Tw. III/10 Kepulauan Riau	Indonesia
1.	25	Karet dan Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	-3,92	-5,36	-0,62
2.	28	Barang-barang dari Logam kecuali Mesin dan Perlengkapannya	-0,99	-1,91	3,92
3.	29	Mesin dan Perlengkapannya	-3,87	-8,58	1,41
4.	31	Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	15,79	19,03	-3,05
5.	32	Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	-14,40	4,62	6,51
6.	33	Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	10,39	-3,03	-9,61
	IBS	Provinsi Kepulauan Riau	-12,88	1,52	2,02

Sumber : BPS Prov. Kepulauan Riau, 2009

Pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang Triwulan III tahun 2010 di Provinsi Kepulauan Riau secara total mengalami kenaikan sebesar 1,52 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan II tahun 2010. Sedangkan secara nasional pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang triwulan III tahun 2010 juga meningkat sebesar 2,02 %. industri karet dan arang dari karet dan barang dari plastik masih mengalami pertumbuhan produksi negatif (turun) sebesar -5,36 % (q-to-q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -0.99%.

Untuk industri barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya mengalami penurunan produksi sebesar -1,91 % (q-to-q) dibandingkan triwulan II tahun 2010. Industri mesin dan perlengkapannya mengalami pertumbuhan negative sebesar -8,58 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan II tahun 2010

Salah satu industri yang tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan berasal dari industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya yang mengalami kenaikan produksi sebesar 19,03 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan II tahun 2010 yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,79%. Hal ini sangat menggembirakan mengingat pertumbuhan produksi nasional justru turun sebesar -3,05 %. Industri lainnya yang mengalami pertumbuhan positif adalah industri *radio, televisi dan peralatan komunikasi* serta perlengkapannya mengalami

kenaikan produksi sebesar 4,62 % (q-to-q) dimana pada Triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan negative sebesar -14,40% Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng mengalami penurunan produksi sebesar -3,03 % (q-to-q) dibandingkan triwulan II tahun 2010. (Lihat table 3)

C. Permasalahan Dalam Kawasan Industri

Gambaran secara keseluruhan kondisi industri di Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang signifikan. Namun masih perlu usaha keras bila ingin menjadikan sebuah kawasan industri dengan bentuk klaster agar dapat bersaing di kawasan ASEAN dengan adanya studi lanjutan dan lebih rinci. Dengan dasar kerangka pemikiran di atas maka seharusnya kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau bisa menjadi klaster dalam sebuah wilayah yang dibangun dengan fokus kepada satu keunggulan tertentu. Sebuah klaster ditopang oleh beberapa hal, yaitu kondisi bisnis, infrastruktur, kondisi pasar, regulasi pemerintah, pendidikan, industri lain yang relevan, serta sumber pendanaan atau keuangan.

Seperti konsep kawasan industri klaster dalam era globalisasi yang disampaikan sebelumnya, pengembangannya akan terjadi dengan baik apabila persyaratan dalam klaster seperti yang dituliskan di atas dapat dipenuhi. Dalam studi di Provinsi Kepulauan Riau, upaya yang dihadapi adalah bagaimana menyiapkan semua infrastruktur dalam sebuah klaster industri yang relevan. Misalnya, untuk pendidikan, jelas sekali Kepulauan Riau butuh pendidikan menengah kejuruan yang relevan dengan klaster kelautan, baik perikanan, perkapalan, serta pariwisata kelautan. Demikian pula dengan perguruan tinggi, baik universitas maupun politeknik, pengembangannya diarahkan untuk membentuk klaster unggulan tersebut. Seharusnya pemda melakukan ini, agar Kepulauan Riau akan bisa menjadi propinsi yang unggul di Indonesia di masa depan.

Khusus untuk Batam, walaupun merupakan bagian dari Kepulauan Riau, situasinya agak berbeda. Kalau melihat *strategic positioning* Batam dan Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh keberadaannya yang bersebelahan dengan Singapura. Jika Singapura memiliki *strategic positioning* sebagai pusat jasa, informasi, transportasi, dan keuangan, maka Batam harus mampu menjadi *complementary* terhadap Singapura tersebut. Dari awal memang *strategic positioning* Kepulauan Riau seharusnya seperti itu, yaitu menjadi kawasan klaster industri yang menunjang negara-negara kawasan Asia

Tenggara, terutama Singapura dan Malaysia. Oleh sebab itu Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan oleh Otorita Pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam atau Otorita Batam Berbagai industri berat berteknologi tinggi seperti McDermott, Vetco Gray, dan sebagainya ada di sini. Industri ini memiliki pusat di Singapura, dan Batam adalah semacam "*hinterland*"-nya berupa kluster industri²⁴.

Namun demikian, menurut pejabat pada badan Pengusahaan Otorita Batam, kondial setelah adanya otonomi daerah, terlihat pengembangan kegiatan industri ini semakin berkurang. Belum lagi dualisme pengelolaan Batam, yaitu pemko dan Otorita batam, yang terlihat ada tumpang-tindih kebijakan di sana-sini serta perebutan kewenangan. Khusus untuk industri berat seperti ini, belum terlihat kemajuan yang berarti di Batam terutama pada tahun-tahun belakangan ini akibat adanya berbagai kebijakan. Apakah memang Provinsi Kepulauan Riau dijadikan kluster industri yang berteknologi tinggi? Namun dengan melihat kondisi yang ada, pengelolaan klasternya belum terencana dan tertata dengan baik. Keberadaan seperti Batam *digital island* bisa jadi merupakan salah satu upaya untuk membenahi hal ini. Namun disadari masih banyak hambatan yang dihadapi, seperti perizinan instansi terkait barang-barang yang belum dilimpahkan ke Badan pengelolaan Kawasan.²⁵

Diakui bahwa selama ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menyusun rencana pengembangan kluster industri unggulan secara keseluruhan, terlebih di wilayah Bintan Karimun dengan merinci keunggulan dari masing-masing kawasan. Kebijakan Ini dimaksudkan agar ketiga kawasan bebas itu tidak saling bersaing tapi justru saling mendukung sebagai sebuah kawasan terintegrasi. Selain itu, pemerintah bisa menyinergikan peraturan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang-tindih dan benturan dalam pelaksanaan, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dengan menjalin kerjasama antar instansi yang lebih harmonis dan mengurangi ego sektoral²⁶.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terdiri dari 96% lautan, dan hanya 4% daratan ²⁷. Secara umum, industri maritim adalah *strategic positioning* dari Kepulauan Riau. Potensi industri yang berkaitan dengan maritim ini memiliki banyak sub-industri yang bisa diangkat sebagai potensi industri

²⁴ Hasil wawancara dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas-Batam, tanggal 4 Mei 2010

²⁵ Hasil wawancara dengan **Septia Atma, S.Sos** Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam Kepulauan Riau, tanggal 5 Mei 2010

²⁶ Hasil penjelasan Achyar P. Nasution Direktur Eksekutif Kadin Kota Batam Kepulauan Riau, tanggal 5 Mei 2010

²⁷ Hasil wawancara dengan Ir Sunipto Kabid Pendataan dan Litbang Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 1 Mei 2010

klaster, antara lain perikanan, perkapalan, pariwisata kelautan. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki keunggulan komparatif yang lain, yaitu terletak di posisi silang jalur pelayaran. Posisi Kepulauan Riau secara geografis memang diuntungkan karena berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang letaknya strategis daerah sebagai pusat pertumbuhan. Terutama sektor industri dan perdagangan penyumbang terbesar dari sektor tersebut adalah adanya Kawasan Bebas Pelabuhan Bebas (KBPB).

Dengan demikian, Kepulauan Riau seharusnya memiliki *strategic positioning* industri maritim, meliputi perikanan, perkapalan, dan pariwisata kelautan. Selain itu diharapkan setelah adanya pembentukan kawasan BBK prospek pertumbuhannya diharapkan menjadikan ASEAN sebagai peluang pasar maupun basis produksi potensial. Secara sektoral, salah satu sektor potensial adalah sektor elektronik, termasuk di dalamnya industri teknologi informasi dan komunikasi. Sektor elektronik menjadi sektor yang punya tingkat integritas tinggi di ASEAN²⁸.

Untuk pariwisata kelautan, sudah mulai dilakukan pengelolaan yang serius. Kita bisa melihat Bintan Resort sebagai sebuah wilayah pariwisata kelautan yang terpadu. Bintan Resort ini menjadi jangkar untuk industri pariwisata kelautan di daerah ini, dengan penyangganya berbagai obyek wisata kelautan yang lain yang tersebar diberbagai tempat di Kepulauan Riau. Sebuah klaster pariwisata kelautan sudah dibangun dengan serius di Bintan.

Untuk industri perkapalan, dalam hal ini adalah galangan kapal, belum terlihat secara serius. Untuk sektor ini, kompetitor terbesar masih ada di Singapura. Nampaknya kawasan BBK dengan potensi yang dimiliki Kepulauan Riau, rasanya perlu kerja keras untuk dapat membangun galangan kapal untuk kapal-kapal menengah, dan merebut pasar yang ada, karena, untuk sektor ini memerlukan teknologi.

Namun demikian untuk sektor yang berkaitan dengan perikanan, belum terlihat adanya sentra atau klaster industri perikanan yang dibangun secara serius, seperti halnya klaster industri pariwisata di Bintan. Dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang memiliki laut yang luas, potensinya besar sekali. Tinggal bagaimana mengundang investor untuk mengisi kekosongan bisnis ini.

Melalui pembentukan Kawasan BBK dengan Batam sebagai embrio klaster industri diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi. KEK merupakan

²⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Azwirullah kapid Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2010

suatu kawasan ekonomi terpadu yang memperoleh fasilitas khusus untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian. KEK dapat mencakup satu atau beberapa zona sekaligus, yaitu zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan zona ekonomi lainnya. Termasuk salah satu zona tersebut adalah lokasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perumahan serta koperasi. Kawasan BBK di Provinsi Kepulauan Riau dalam pengembangan kawasan industri tentunya dibutuhkan infrastruktur karena investor tidak akan datang bila infrastruktur tidak memadai. Khusus untuk Batam sebagai kawasan industri infrastruktur, jalan, listrik air, bandara dan pelabuhan yang baik memang cukup memadai. walaupun demikian masih ada permasalahan lain setelah otonomi daerah dan dewan kawasan yang mengakomodasi undang-undang KEK. Demikian pula dengan kawasan Bintan dan Karimun masih menghadapi masalah infrastruktur sebagai syarat dalam menarik investor. Pasokan listrik Kepulauan Riau masih menghadapi kesulitan. Dengan hanya mengandalkan pasokan dari PLN semata biaya infrastruktur koneksi sangat mahal karena provinsi kepri terdiri dari pulau-pulau²⁹.

Status lahan hutan juga tidak jelas. Belum ada aturan yang jelas tentang pembebasan lahan. Lahan yang ada di Bintan tidak sama dengan di Batam. Kalau di Batam lahannya dikuasai penuh oleh Otorita Batam, di Bintan, lahan tersebut milik masyarakat. Jadi untuk menanganinya diperlukan beberapa tahapan. Untuk menyelesaikan masalah ini tidaklah mudah, ini hanya bisa memfasilitasi agar cepat dijadikan lahan investasi.

Berkaitan dengan FTZ peraturan sangat berbeda antar lembaga Bappenas, BKPM, Disperindag, Memko/depkeu dan Pemerintah Provinsi. Bila Thailand dan Malaysia mempersiapkan *masterplan*, regulasi, kemudian lahan setelah itu baru di *launching*. Persoalan FTZ di Batam yang terdiri dari 7 pulau tidak *enclave* misalnya, jalan menuju Bareleng (Batam, Rempang dan Galang) sangat baik, namun lahan-lahan juga belum jelas. Demikian pula permasalahan prosedur investasi BKPM sekarang bahkan lebih rumit lagi mengingat harus melapor lagi ke pusat³⁰.

Sebenarnya wilayah BBK dapat menjadi kawasan ekonomi khusus dengan bentuk klaster adalah daerah karean memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geostrategi dan mempunyai jalur perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi ketiga wilayah itu tahun 2009 mencapai lebih dari 7 persen di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya 5 persen, lebih dari 80 ribu tenaga

²⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Ir. Nuraida Mokhsen MA .Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Prov Kep Riau. Tanggal 2 Mei 2010

³⁰ *ibid*

kerja dapat terserap, dan investasi yang masuk tahun 2007 paling tinggi dari seluruh provinsi yang ada, yaitu sebesar 10.018 US\$. Namun BBK masih saja menghadapi permasalahan dalam upaya peningkatan investasi. Pemerintah Daerah terus melakukan promosi potensi ekonomi agar investor mau menanamkan modal dengan membangun industri di BBK. Namun demikian, kesiapan dan kepemilikan lahan ternyata tidak mendukung, mengingat banyak lahan belum dibebaskan oleh pemerintah dan harga lahan yang melonjak. Kemudian masalah peruntukan lahan untuk industri yang tergantung RTRW provinsi, kota dan kabupaten yang harus dilakukan oleh Bappeda. Perkembangan investasi setelah adanya BBK belum terlihat secara signifikan, karena banyak investor yang berkomitmen namun belum melaksanakan.³¹

Permasalahan tersebut juga dialami untuk kawasan Bintan dan Karimun di mana masih terkendala kondisi infrastruktur yang belum memadai. Tentunya kendala ini merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintahan provinsi, dewan kawasan dan BKPM dalam menarik investor. Bahkan Batam yang telah lama eksis sebagai kawasan industri masih mengalami masalah hukum dan keamanan serta ketenagakerjaan dan status hukum lahan di pulau Bareleng, terlebih setelah penerapan otonomi daerah³²

Dengan diundangkannya Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ternyata tidak juga memecahkan permasalahan birokrasi yang selama ini dialami. Mengingat konsekuensi implementasi undang-undang tersebut untuk membentuk institusi baru yang disebut Dewan Kawasan pada tingkat Pusat dan Provinsi, maka seluruh kegiatan dalam kawasan tersebut harus melaporkan dan meminta izin kepada lembaga baru tersebut. Namun demikian adanya regulasi berbentuk undang-undang KEK yang seharusnya memberikan berbagai fasilitas berbeda ternyata tidak sesuai antara konsep dengan realisasi di lapangan. Bahkan kebijakan tersebut tidak selaras dengan harapan dari para pelaku industri, seperti terkait ketentuan perizinan, infrastruktur, kepemilikan lahan, ketenagakerjaan, perpajakan, atau peraturan daerah termasuk retribusi daerah.

Sisi peraturan, investor dan pelaku industri masih melihat adanya tumpang tindih peraturan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkait investasi, terdapat beberapa peraturan yang masih perlu dikaji lagi karena mendistorsi tujuan dari menarik investasi. Misalnya, peraturan tentang pemberian

³¹ Hasil wawancara dengan **Drs. Jon Arizal** Kepala BKPM Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 3 Mei 2010

³² Lihat Laporan akhir "Mempersiapkan Baram Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. CSIS, Desember 2006

izin usaha yang harus melalui beberapa pintu dan prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada sosialisasi kepada pelaku usaha.

Sebagai sebuah klaster industri, BBK masih terkendala banyak faktor dalam implementasinya. Dari sisi pengusaha sendiri, hasil penelitian dan wawancara menunjukkan pada umumnya minat investor berinvestasi ke suatu negara atau wilayah tertentu timbul apabila memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal. Banyak pengusaha mengeluhkan empat hal mendasar. Kepastian hukum biasanya merupakan kendala utama dalam berinvestasi.

Sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan, pembentukan sebuah kawasan dalam bentuk klaster tersebut mempunyai peran untuk menarik investasi sebesar-besarnya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan daya saing produk unggulan daerah di dunia internasional dengan meminimalisir birokrasi. Dengan pembentukan kawasan di BBK dalam klasterisasi, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan memiliki banyak pusat pertumbuhan ekonomi (*growth poles*) yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menggali potensi ekonomi daerah. Secara teoritis, pusat pertumbuhan juga bertumpu pada kepercayaan terhadap kekuatan pasar bebas yang akan memengaruhi terjadinya *trickle down effect* (dampak ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah lainnya.

Seperti konsep *klaster* yang disampaikan sebelumnya, pengembangan semua potensi ini baru akan terjadi dengan baik apabila persyaratan sebuah klaster seperti yang dijelaskan di atas dapat dipenuhi. Untuk itu bila kawasan BBK di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kawasan industri dapat bersaing, maka lembaga-lembaga yang ada berusaha bagaimana menyiapkan semua infrastruktur layaknya sebuah klaster industri. Misalnya, untuk pendidikan, jelas sekali Prov Kepulauan Riau butuh pendidikan menengah kejuruan yang relevan dengan klaster kelautan, baik perikanan, perkapalan, serta pariwisata kelautan. Demikian pula dengan perguruan tinggi, baik universitas maupun politeknik, pengembangannya diarahkan untuk membentuk klaster unggulan tersebut.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Kesepakatan AC-FTA secara umum menjadi tantangan dalam sektor industri dan perdagangan regional. Kebijakan pusat tersebut mau tidak mau

harus diadopsi oleh pemda termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kawasan ekonomi berbentuk klaster di Batam, Bintan dan Karimun.

Sebagai daerah yang secara geografis strategis dan telah memiliki kawasan industri berbentuk klaster, BBK belum berkembang dan belum mampu menggali potensi sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Data-data di atas menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri tidak sesuai dengan yang direncanakan, terlebih untuk kawasan Bintan dan Karimun. Bahkan untuk kawasan Batam masih mengalami permasalahan mendasar setelah pemberlakuan otonomi dan Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adanya Perubahan regulasi dan pembentukan institusi telah meningkatkan ketidakpastian berusaha bagi investor pada kawasan BBK.

Kawasan BBK di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi masalah dalam pengembangan industri adalah birokrasi, perizinan, kepastian hukum, masalah hak penggunaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Demikian pula kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kurang kondusif menyebabkan keraguan dan kecemasan investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan BBK tersebut.

Strategi pembentukan klaster dalam sebuah kawasan yang strategis merupakan salah satu upaya menghadapi persaingan di era pasar bebas. Kawasan berbentuk klaster industri Provinsi Kepulauan Riau, belum secara maksimal menawarkan perlakuan-perlakuan istimewa dalam prosedur perijinan yang lebih sederhana, pelayanan investor yang lebih baik, infrastruktur yang lengkap, serta perlakuan pajak dan pabean yang berbeda dengan daerah lain yang bukan kawasan ekonomi.

Melalui kebijakan klaster industri akan sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan persaingan dengan kegiatan industri skala besar yang berdampak terhadap kapasitas kelompok usaha kecil dan menengah agar terjadi alih teknologi dan berdampak terhadap efisiensi produksi.

B. Rekomendasi

Dalam perdagangan bebas, salah satu strategi adalah pembentukan kawasan industri berbentuk klaster yang didesain untuk memberikan perlakuan yang lebih baik dan menarik untuk investor. Seharusnya klaster industri dapat mendorong sektor industri yang ada di daerah akan dapat berkembang sesuai dengan kompetensi inti yang dimiliki oleh setiap daerah. Penciptakan kawasan industri seharusnya memberikan pelayanan terbaik, baik dalam perijinan, perpajakan dan kepabeanan. Selain itu kawasan harus dapat memberikan fasilitas keamanan, memiliki infrastruktur terbaik, seperti fasilitas jalan raya,

pelabuhan, *airport*, transportasi, telekomunikasi, listrik dan air. Dalam kawasan klaster insentif pajak dan manajemen implementasi undang-undang ketenagakerjaan dan pertanahan yang lebih baik juga dapat meningkatkan daya tarik kawasan khusus tersebut.

Dalam upaya pemberian perlakuan istimewa ini, diperlukan sinkronisasi dalam Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Karimun dengan aturan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas. Solusi komprehensif terhadap masalah-masalah yang selama ini dikeluhkan investor dapat dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Sistem pengelolaan kawasan, pembagian wewenang dan fungsi antar institusi yang terlibat, harus ditetapkan sebelum kawasan dibentuk. Kalaupun telah dibentuk perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan kawasan tersebut. Hal ini termasuk kejelasan mengenai kepemilikan serta pengelolaan kawasan antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau keduanya dan pengelola kawasan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta atau kerja sama antara pemerintah dan swasta atau dalam bentuk badan usaha milik negara.

Perlu skema yang jelas mengenai fasilitas yang diberikan kawasan dan hal-hal yang harus disiapkan oleh institusi terkait untuk pengembangan kawasan tersebut. Hal ini penting karena kawasan berbentuk klaster industri sebagai upaya memperkuat keterkaitan sektor industri dari hulu sampai hilir yang saling menguntungkan antar *stakeholder* di daerah suatu daerah dengan daerah lain baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan kerangka usaha industri yang lebih jelas dan terarah termasuk penyediaan infrastruktur yang lebih sesuai dengan dunia usaha di kawasan tersebut. Karena dalam klaster industri spesifik daerah sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat.

Perlu inisiatif pengembangan, penyusunan kerangka dan agenda pengembangan dalam peningkatan daya saing, implementasi dan pemantauan, evaluasi serta perbaikan seluruh permasalahan dalam kawasan BBK yang keterkaitan potensi yang dimiliki. Peran pemerintah dalam pengembangan Klaster industri sesuai potensi perlu diimbangi dengan upaya perbaikan peran instansi pemerintah daerah yaitu: dalam pengembangan dan keunggulan daya saing klasterisasi industri, memperkuat sistem dukungan terpadu bagi klaster termasuk menciptakan struktur insentif untuk peningkatan efisiensi.

Daftar Pustaka

Buku

- Chacholiades, M. *International Trade Theory and Policy*. McGraw-Hill. 1978
- Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones. *World Trade and Payments. An introduction*. Sixth Edition. Harper Collins. New York. 1993
- Hadi, PU. *Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Gregory N. Mankiw, *Teori Makroekonomi*, Havard University, alih bahasa Imam Nurmawan, SE Edisi ke lima, Penerbit Universitas Airlangga, 2003
- Kindleberger, C.P. and P.H. Lindert. *International Economics*. Six Edition. Richard D. Irwin. Inc. Homewood. Illinois 60430. 1978.
- Lincolin Arsyad, "*Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*", BPFE Yogyakarta, 1999
- Martin Pangabean. and Ottaviano. *Growth and Agglomeration*, International Economic Review 42, No. 4, 2001
- McGee T.G.. *The Emergence of Desa kota Regions in Asia*. Expanding a Hypotesis. Honolulu: University of Hawai Press. 1991, Dalam Dr. Mudrajad Kuncoro, SE, M.Sc.Sc "Aglomerasi Perkotaan di DIY: Apa Di mana dan mengapa?". Jurnal UNISIA, No. 59, Vol. 24, 2006.
- Michael E Porter, *The Competitive Advantage of the Nations*. Free Press, New York. 1990
- Sri Mulyani Indrawati *Liberalisasi dan Pemerataan dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*. Editor Soetrisno, L. dan F. Umaya. Yogyakarta: P. Tiara Wacana Yogya. 1995

Makalah

- Abidin, Z. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indone-sia: Suatu Analisis Kebijakan. Disertasi, tidak dipublikasikan. Program Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor. Tahun 2000. Dalam Gatoet S. Hardono. Handewi P.S Rachman dan Sri H. Suhartini, Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empiris dan Prepektif Ketahanan Pangan Jurnal Forum Argo Ekonomi Volume 22 No.2 Desember 2004

Surat Kabar

"Produk Cina memang murah", Harian Kompas. Minggu 3 Januari 2010
"Ekspor diperkirakan tumbuh 10% ITPC". Harian Bisnis Indonesia, Jumat, 05
Maret 2010.

Internet

"Jepang Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor Indonesia", [http://
www.tempointeraktif.com/](http://www.tempointeraktif.com/) Senin, 01 Maret 2010,

"Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan III."
[http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/KepRiau/
KER+Provinsi+Kep+Riau+Triwulan+III-2007.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/KepRiau/KER+Provinsi+Kep+Riau+Triwulan+III-2007.htm)

Dokumen Resmi

Undang Undang No 39 No 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)

BPS, "Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka", 2009

_____, "Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka", 2010

Laporan akhir "Mempersiapkan Baram Sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus".CSIS, Desember 2006

